

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

5.1.1.1 Kepentingan Kelompok Sasaran

1. Partisipasi masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, peran masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan yakni dengan mengikuti adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu masyarakat menjadi pengawas dalam lingkungannya sendiri dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang merupakan kasus dengan jumlah paling tinggi se-Jawa Tengah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi yakni dengan mengajak masyarakat untuk memberikan perlindungan perempuan dari tindakan

kekerasan. Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat berupa layanan konseling, mediasi serta adanya PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Selain itu masyarakat menggunakan tokoh masyarakat atau seseorang yang paling berpengaruh dalam lingkungan masyarakat untuk dapat menyelesaikan segala kasus yang terjadi agar tindakan kekerasan tidak semakin menjadi.

3. Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi

Informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Salah satunya yaitu informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi yakni melalui sosialisasi, media massa serta komunikasi secara langsung.

5.1.1.2 Manfaat yang akan diterima

1. Berkurangnya angka kekerasan melalui penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan

Indikator penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan ini merupakan salah satu dari tujuan peraturan daerah Kota Semarang untuk menurunkan angka kekerasan yang terjadi. Upaya yang sudah dilakukan dalam menghapus maupun mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan melalui beberapa layanan yang diberikan untuk mengurangi angka kekerasan yaitu adanya layanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, penegakan dan reintegrasi sosial.

2. Lingkungan masyarakat yang damai dan terlepas dari tindakan kekerasan

Menghapus atau menghilangkan kasus kekerasan di lingkungan masyarakat bukanlah suatu persoalan yang mudah. Mengingat budaya yang sudah terpatrit di dalam lingkungan masyarakat yang menganut budaya patriarki, sehingga tidak heran apabila masih ditemukan kasus kekerasan yang terjadi. Kondisi masyarakat yang malu dan takut untuk melakukan menjadi point tersendiri bagi pemerintah untuk membangun pola pikir masyarakat agar dapat terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat akan tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan yang sering terjadi, sehingga akan tercipta lingkungan masyarakat yang damai.

5.1.1.3 Perubahan yang diinginkan

1. Membangun lingkungan masyarakat yang peduli terhadap tindakan kekerasan

Kasus kekerasan dan berkembang

Memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pola pikir yang harus dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah selaku lembaga pelaksana kebijakan agar dapat membuka pandangan masyarakat betapa pentingnya melindungi perempuan dari tindakan kekerasan atau memberikan kepercayaan seperti yang disampaikan oleh Adi W. Selain pendekatan juga dilakukan adanya sosialisasi yang menyeluruh

untuk dapat memberikan pengaruh agar masyarakat lebih peduli kepada perempuan. Dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi adanya penolakan, akan tetapi pihak pemerintah melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar untuk dapat melakukan adanya pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menerima keberadaan pemerintah di sekitarnya.

2. Peningkatan responsivitas pemerintah

Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rendahnya kemampuan Aparat birokrasi merespons dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap birokrasi. Inisiatif dan kreativitas birokrasi dalam merespons krisis dan dampaknya sama sekali tidak memadai. Masyarakat mengharapkan birokrasi untuk memberi respons yang tepat dan cepat terhadap krisis yang terjadi menjadi amat kecewa karena ternyata tindakan birokrasi cenderung reaktif dan tidak efektif.

5.1.1.4 Ketepatan program

1. Proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan program

Penetapan kebijakan maupun program dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan dari tingkat kecamatan yang dibantu oleh pihak kelurahan maupun Rt/Rw dalam hal penampungan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian dirapatkan pada tingkat yang lebih tinggi bersama dengan para

anggota dewan dan wakil rakyat lainnya. Mekanisme ini dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang diinginkan agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan. Pelaksanaan proses penetapan kebijakan maupun program tak lepas terjadi adanya konflik antar sektor maupun adanya ego sektoral dikarenakan adanya prioritas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dampak dari adanya konflik antar sektor ini dapat dilihat dilihat dari RPJMD Kota Semarang yang kurang memperhatikan perihal kekerasan perempuan untuk menjadi salah satu prioritasnya.

2. Bentuk dan upaya pencegahan, perlindungan dan penghapusan yang dilakukan oleh Dinas P3A

Tujuan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan terdiri dari pencegahan, penghapusan, dan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang tercantum di dalam Pasal 3. Dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut, dinas melakukan kerja sama dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun non pemerintah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, LSM, rumah sakit, kepolisian, pengacara, masyarakat serta instansi lainnya untuk bersama-sama dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan yakni dapat menurunkan angka kekerasan di Kota Semarang. Tujuan ini berupaya untuk menurunkan angka kekerasan yang terjadi di Kota Semarang. Hal ini dilakukan karena melihat bahwa angka kekerasan yang terjadi di Kota Semarang merupakan

angka tertinggi di daerah Jawa Tengah dibandingkan dengan daerah lainnya dan setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni dengan melakukan sosialisasi, simulasi, pendampingan dan memberikan pelayanan-pelayanan yang telah disediakan oleh pelaksana kebijakan.

3. Penyediaan layanan perlindungan perempuan

Pelayanan yang diberikan dalam melindungi korban kekerasan khususnya perempuan yakni penanganan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

4. Bentuk upaya pemulihan fisik, medis, pemulangan korban, pendampingan psikologis dan bimbingan rohani

Salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas dalam mengatasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan melakukan pemulihan. Pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi psikologis yang baik. Upaya pemulihan ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan, karena apabila tidak dilakukan dengan segera akan berpengaruh buruk bagi kondisi korban. Langkah-langkah upaya yang dilakukan untuk memberikan pemulihan yakni melalui rumah aman, layanan konseling serta rumah duta revolusi mental. Upaya yang sering dilakukan untuk memberikan pemulihan bagi korban yakni melalui layanan konseling

5. Pembukaan aksesibilitas baik untuk pendidikan, pelatihan, pendanaan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial

Kemudahan akses dapat diberikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Salah satunya yaitu terkait dengan fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas dalam penyelenggaraan tanggung jawab terhadap korban kekerasan yaitu berupa pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. pemberian fasilitas ini didukung dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas dengan anggota-anggota lainnya yang berada di instansi-instansi di Kota Semarang.

6. Kerjasama dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan dan penghapusan yang dilakukan oleh Dinas P3A

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan adanya koordinasi antar tiap anggota melalui rapat koordinasi, rapat kerja, rapat kasus dan rapat evaluasi. Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban akibat kekerasan yang dialaminya. Namun dalam pelaksanaanya masih terkendala adanya faktor anggaran yang belum memadai sehingga kadang melakukan adanya sumbangan secara sukarela antar anggota untuk menutup anggaran yang masih kurang, ego sektoral antar tiap bidang dalam layanan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan dan keterbatasan jaringan.

5.1.1.5 Kejelasan Implementor

1. Kejelasan

Indikator kejelasan juga merupakan elemen yang penting. Kejelasan disini lebih melihat dari sisi komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Kejelasan komunikasi ini terdiri dari penyampaian informasi oleh Dinas kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas baik dari media cetak dan media langsung kurang ditangkap secara jelas oleh masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan informasi tersebut, masih ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.

2. Konsistensi

Penyampaian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini terlihat dari intensitas penyampaian kebijakan yang tidak terjadwal secara tetap. Konsistensi penyampaian sosialisasi juga mengalami perubahan. Semula sosialisasi dilakukan sampai tingkat RT, namun sejak beberapa tahun terakhir sosialisasi hanya dilakukan melalui karang taruna dan lpmk.

5.1.1.6 SDM yang memadai

1. Sumberdaya manusia

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang vital. Staf merupakan esensial terpenting dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan masih terbatas. Hal ini menyebabkan sering terjadi *overlapping* dalam pembagian tugas. Hal tersebut juga membuat kinerja dari SDM yang dimiliki oleh Dinas menjadi kurang maksimal dalam menangani kasus kekerasan di Kota Semarang. Selain itu, jumlah SDM untuk pendamping korban sebagai pembantu pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 juga masih terbatas, sehingga tidak dapat dielakkan jika penegakkan Perda belum efektif dijalankan.

2. Anggaran

Sebuah kebijakan publik tidak dapat berjalan jika tidak terdapat anggaran pendukung. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijaka, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut dirasa masih kurang karena masih banyak hal atau inovasi yang ingin diciptakan oleh

Dinas untuk menurunkan jumlah angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Selain itu anggaran dana juga dirasa masih belum cukup karena jumlah kasus kekerasan yang setiap tahunnya tidak dapat diprediksi sehingga anggaran yang sudah dianggarkan masih belum memenuhi segala kebutuhan di lapangan.

3. Fasilitas

Fasilitas dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dinilai kurang memadai. Hal ini karena meskipun sarana dan prasarana sudah cukup lengkap dan tersedia, namun kondisinya masih kurang memadai yaitu kondisi kantor sekretariat yang juga sebagai kantor pelayanan terhadap korban sangat tidak representatif dan kecil tersebut menjadi alasan mengapa kondisi sarana prasarana kebijakan ini belum memadai.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan yang dilakukan yaitu berupa training yang dilaksanakan setiap tahun sekali secara konsisten dengan mengusung tema yang berbeda. Tujuan tema yang dilakukan berbeda setiap tahun agar ilmu yang diperoleh merata dan berbeda sehingga menambah pengetahuan bagi anggota maupun pendamping korban. Training ini ditujukan kepada seluruh pendamping korban kekerasan dan anggota unit pelaksana teknis

agar dapat lebih kompeten dalam menjalankan pelayanan kepada para korban.

Pengawasan merupakan usaha agar pencapaian tujuan organisasi tepat rencana yang telah ditargetkan Dasar yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan dalam menjalankan aktivitasnya yaitu adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur secara detail terkait hal-hal yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban. Selain SOP, juga terdapat peraturan daerah yaitu Perda No. 5 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Pengawas sesungguhnya yakni masyarakat yang turut berperan aktif dalam melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga hal tersebut menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan, sehingga Dinas dan anggota lain yang ikut terlibat di dalamnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku

5. Informasi

Informasi merupakan salah satu variabel yang terdapat di dalam indikator sumber daya. Variabel ini memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan peraturan daerah untuk sampai ke masyarakat dan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mengetahui tentang peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Informasi yang diberikan oleh Dinas terkait kebijakan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ini belum merata ke seluruh masyarakat di Kota Semarang. Hal ini didukung dengan fakta di lapangan yakni masyarakat yang belum menerima adanya sosialisasi menyeluruh yang dilakukan oleh pihak pemerintah, sehingga tak jarang apabila masih terjadi banyak kekerasan.

5.1.1.7 Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki

1. Penerapan strategi dalam pelaksanaan kebijakan

Berbicara mengenai strategi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki strategi yakni dengan melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak dapat dihapuskan karena itu sudah menjadi budaya yang ada di masyarakat yang menganut budaya patriarki sehingga tak jarang perempuan menjadi korban kasus kekerasan. Strategi yang dimiliki oleh Dinas dilihat dari struktur birokrasi yang terdapat di dalamnya yakni berkenaan dengan SOP yang dimiliki.

2. Pembagian peranan baik swasta maupun pemerintah dari segi kepentingan dan kekuasaan

Peran pemerintah dilihat dari sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan fungsinya yakni fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan. Peran swasta dilihat dari sejauh mana swasta mendukung jalannya implementasi Perda tersebut.

5.1.1.8 Karakteristik institusi yang terlibat

1. Budaya organisasi

Karakteristik institusi berkaitan dengan adanya budaya organisasi. Budaya organisasi ini dapat dilihat dari tingkat disposisi yang diberikan. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yakni berkenaan dengan komitmen dan kemampuan aktor pelaksana kebijakan.

Rendahnya responsifitas merupakan cerminan dari budaya organisasi yang tidak baik yakni Dinas dalam menanggapi adanya laporan positif kasus kekerasan dari masyarakat terlihat dari pelayanan yang harus dilakukan secara langsung sehingga korban harus menempuh jarak diperjalanan untuk dapat sampai di kantor sekretariat. Prosedur ini tentu saja membuat masyarakat merasa bahwa Dinas kurang responsif terhadap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu disposisi yang dilakukan Dinas tidak tersampaikan dengan baik dengan anggota lainnya untuk melakukan pertemuan dalam membahas kasus yang terjadi, sehingga informasi yang tersampaikan tidak tepat sasaran sering berubah dikarenakan perbedaan disposisi yang diberikan.

2. Koordinasi dan Kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain

bentuk koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan PPT dalam perlindungan yang diberikan kepada korban merupakan koordinasi fungsional. Hal ini didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi tertentu. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan PPT tidak memiliki hubungan horizontal dan hubungan vertikal, namun kedua lembaga tersebut memiliki hubungan koordinasi fungsional. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan PPT sama-sama memiliki tugas dan fungsi dalam membantu pemerintah Kota Semarang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan.

5.1.1.9 Tingkat kebijakan dan responsivitas kelompok sasaran

1. Responsivitas Dinas P3A dalam mendorong masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan

Kondisi kelompok sasaran di Kota Semarang yakni masyarakat yang menjadi tombak kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat atau masih perlu adanya perbaikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana respon yang diberikan oleh pemerintah berupa kebijakan kepada masyarakat terkait penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Fenomena tingkat responsifitas pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dinilai belum memberikan dampak yang signifikan untuk menumbuhkan respon masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari segi

penerimaan masyarakat, dimana tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima adanya Perda tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peneliti menemukan adanya hubungan kausalitas antara pemerintah dan pihak swasta dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan. Hubungan kausalitas ini terjalin dengan adanya sikap saling melengkapi satu sama lain yakni dari pihak swasta ke pemerintah maupun sebaliknya. Hubungan ini tidak tercantum dalam teori yang peneliti gunakan, sehingga merupakan suatu penambahan dari teori yang peneliti gunakan.

5.1.2 Faktor – faktor penghambat yang terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya ketegasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus KDRT, sehingga selalu berujung pada perceraian.
2. Keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah kota Semarang, dan sistem pencairan dana dengan reimburse kurang efektif untuk penanganan korban.

3. Sekretariat dan fasilitas yang tersedia masih kurang memadai.
4. Keterbukaan korban untuk menceritakan kasusnya masih kurang sehingga menyulitkan dalam penanganan.
5. Penanganan kurang melibatkan dua sisi yaitu korban dan pelaku, saat ini hanya lebih kepada korban saja.
6. Monitoring korban tidak terlaksana karena petugas lost contact dengan korban.
7. Standart operasional prosedur masih kurang untuk mendorong komitmen anggota yang tergabung dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan.
8. Koordinasi masih kurang kualitasnya untuk mendorong komitmen pelaksana kebijakan.
9. Rendahnya responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan.
10. Pelaksanaan sosialisasi yang tidak merata menyebabkan tidak seluruh wilayah Kota Semarang mengetahui keberadaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016.
11. Keterbatasan sumberdaya manusia dan kompetensi yang rendah khususnya untuk tenaga pendamping.
12. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk dapat ikut membantu dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan.

1.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Berikut ini beberapa masukan dari peneliti:

1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan perlu dilakukan pembuatan jadwal yang rutin dan menyeluruh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi yang diberikan harus mudah dipahami sehingga seluruh masyarakat paham akan informasi yang diberikan.
2. Penambahan sumber daya dengan cara *open recruitment* yang bersifat sukarela. Terkait terbatasnya anggaran, diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan memperhatikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan anggaran tidak habis sebelum waktu yang telah ditentukan. Melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti menambah peran pihak swasta agar dapat menyokong kurangnya anggaran dan terkait fasilitas, meningkatkan kualitas fasilitas dengan menambah luas bangunan dan mencari lokasi yang tetap agar tidak lagi menggunakan sistem kontrak.
3. Peningkatan responsifitas pemerintah dalam menanggapi laporan posisitif kasus kekerasan terhadap perempuan dari masyarakat dan

segera melakukan tindakan pencegahan agar kasus yang terjadi tidak semakin meningkat.

4. Penguatan koordinasi antar anggota lebih ditingkatkan dan diinsentifkan kembali untuk memperkuat sistem dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan, memberikan kesadaran bagi birokrasi yang terkait untuk lebih peduli dan responsif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dan pembaharuan terhadap standar operasional prosedur.
5. Mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan menyadarkan bahwa kegiatan pencegahan tindak kekerasan perlu dilakukan lebih giat melalui pendampingan dan sosialisasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan perlindungan terhadap perempuan.
6. Perbaiki sistem administrasi yang harus dengan memberikan pelatihan terhadap anggota terkait pentingnya pengadministrasian baik terhadap pelayanan maupun terhadap pendataan kasus yang terjadi.
7. Membangun sistem online terkait layanan pengaduan agar memudahkan korban untuk melakukan pelaporan.
8. Menindaklanjuti lembaga unit pelaksana teknis yang masih bersifat dependen untuk segera menjadi lembaga yang independen.